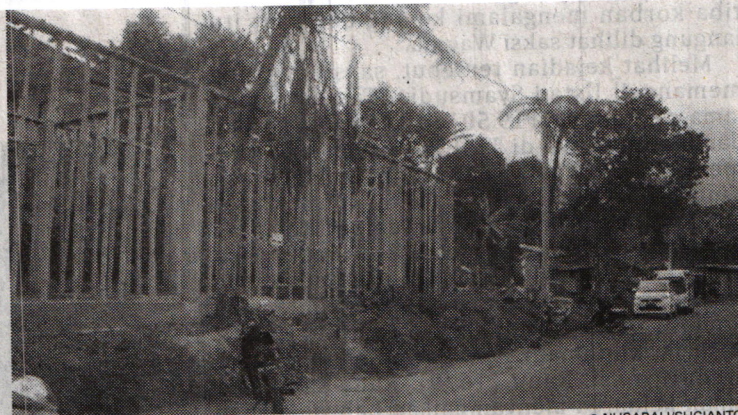
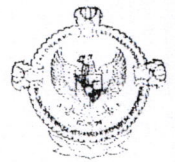




● NUSABALI/SUGIANTO

SALAH satu bangunan di DTW Jatiluwih yang disegel Satpol PP Tabanan karena tak kantongi izin.

Dewan Minta Eksekutif Tegas, Rencanakan Turun ke Jatiluwih

TABANAN, NusaBali

Ribut pembangunan areal parkir yang mencaplok lahan sawah produktif membuat Komisi II DPRD Tabanan yang membidangi pembangunan berencana turun ke DTW Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel. Komisi yang dikomandani Putu Eka Putra Nurcahyadi ini akan menggali informasi di lapangan tentang pembangunan areal parkir yang jadi sorotan publik tersebut.

"Kita minta petunjuk dan izin dulu dari Ketua Dewan. Komisi II memang merencanakan turun. Kita ingin tahu permasalahan di lapangan sehingga harus turun menyerap informasi langsung," ungkap Eka Putra Nurcahyadi, Rabu (16/9). Eka ingin bertemu langsung dengan Badan Pengelola dan Desa Adat yang diserahkan penuh untuk mengelola DTW Jatiluwih. "Kalau memang berdasarkan keputusan masyarakat dan kepentingan badan pengelola sebagai sarana penunjang objek wisata, harus dibuatkan payung hukum," urai Eka Putra.

Anggota DPRD Tabanan dari Fraksi Demokrat, Made Yasa, meminta ketegasan eksekutif untuk ambil sikap atas proyek yang mengeruk lahan hijau tersebut. Jika tak ada sikap tegas maka Jatiluwih yang jadi Warisan Budaya Dunia (WBD) akan dijadikan contoh oleh destinasi wisata lainnya. Bukan sebagai contoh

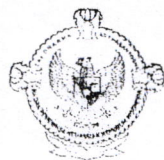
yang baik, tapi contoh buruk atas pembabatan lahan. "Kalau memang itu diizinkan sekalian cabut Perda Jalur Hijau. Jika tak tegas, pariwisata akan hancur," ungkap Yasa.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Tabanan, I Wayan Sugiada, penuh janjinya untuk terjun ke Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Senin (14/9), guna cek lapangan soal aksi bolduzer lahan sawah untuk pembangunan areal parkir yang ditengarai melanggar jalur hijau. Dari cek lokasi kemarin, Pemkab Tabanan belum bisa merestui pembangunan areal parkir di kawasan subak yang masuk Warisan Budaya Dunia (WBD) 'sebelum ada kajian matang.

Sekkab Kabupaten Tabanan, Nyoman Wirna Ariwangsa, menegaskan pada prinsipnya Pemkab Tabanan tak pernah menyetujui pengerukan lahan untuk parkir di DTW Jatiluwih ini. Karenanya, setelah turun ke DTW Jatiluwih, pihaknya berjanji akan mengkaji aspirasi masyarakat setempat. Merujuk Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), kata Wirna Ariwangsa, lokasi lahan parkir tersebut berada di zona pertumbuhan pemukiman, yang artinya ada kemungkinan untuk dibangun. "Meski begitu, kami dari pemerintah tentu akan tetap mengkajinya," tegas Wirna Ariwangsa. **k21**

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : I



Upah Guru Abdi Rp 20 Ribu per Bulan

Mereka bertahan
meski dengan
upah minim karena
berkeyakinan akan
diangkat jadi PNS.

TABANAN, NusaBali
Jumlah guru abdi dan guru kontrak di Kabupaten Tabanan cukup tinggi. Para guru berstatus non PNS ini dianggap sebagai pahlawan pendidikan karena jadi solusi di tengah krisis guru negeri. Hanya saja, upah yang mereka terima per bulannya jauh dari layak. Guru abdi terima upah mulai Rp 180 ribu per bulan, sementara guru kontrak Rp 1,1 juta per bulan.

Informasi yang dihimpun di lapangan, guru abdi di sekolah dasar (SD) rata-rata mendapat upah Rp 200 ribu per bulan. Guru abdi di SMA/SMK justru lebih rendah karena dihitung per jam. Upah guru abdi di SMA/SMK bervariasi antara Rp 20 ribu

Jumlah Tenaga Kontrak di Tabanan	
Tahun	Jumlah
2011	339 orang
2012	1.213 orang
2013	1.871 orang
2014	2.248 orang
2015	2.796 orang

hingga Rp 35 ribu per jam. Jika guru abdi di SD, mengajar 5 jam per hari, guru abdi di SMA/SMK bisa dapat jatah mengajar 8 jam hingga 12 jam per bulan. Artinya, upah guru bantu di SMA/SMK yang diterima hanya Rp 180 ribu hingga Rp 420 ribu per bulan.

Salah seorang guru di SMAN 1 Kediri, Tabanan (Bakta) menyebutkan, gaji guru abdi di sekolah

negeri favorit tersebut sebesar Rp 35 ribu per jam. Mereka dapat jatah mengajar 12 jam per bulan atau mengajar di tiga kelas. Jadi rata-rata guru abdi di sekolah tersebut menerima upah Rp 420 ribu per bulan. Sedangkan di salah satu SMK Negeri di Tabanan, guru abdi hanya diberi upah Rp 20 ribu per bulan dengan jatah 8 jam per bulan. "Kalau bicara upah ya

kecil, namanya juga guru abdi, kita dibayar sesuai kemampuan sekolah. Dapat mengabdikan aja kita syukuri," ungkap sumber di lapangan, Rabu (16/9).

Guru abdi di salah satu sekolah dasar juga menyukuri bisa mengabdikan kemampuannya kepada generasi penerus bangsa. Mereka tak persoalkan upah Rp 200 ribu per bulan yang diberikan pihak sekolah. Harapan mereka suatu saat ketika ada pengangkatan PNS, mereka bisa naik status. Para guru abdi ini pun mempercayai, kelak mereka akan jadi PNS mengingat setiap tahun jumlah guru pensiun cukup banyak. "Kami berharap nantinya bisa diangkat jadi PNS, kalau tak diawali dengan pengabdian, saya pikir susah jadi PNS," ungkap sumber di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tabanan, Putu Santika, mengakui Tabanan darurat guru. Selama ini kekurangan guru 'ditambal' dengan guru kontrak dan abdi.

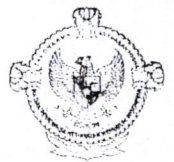
Hanya saja jumlah pasti guru kontrak dan guru abdi di Tabanan ia tidak ketahui, sebab kepala bidang yang menangani tugas keluar daerah. "Kita di Tabanan kekurangan guru, terutama di kecamatan yang jauh dari perkotaan," ungkap Santika.

Sementara Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kecamatan Selemadeg Barat, Nyoman Sukrata mengatakan, jumlah SD mencapai 20 sekolah. Idealnya jumlah guru PNS sebanyak 120 orang dengan perhitungan jumlah guru per sekolah 6 orang. Namun nyatanya jumlah guru PNS di Kecamatan Selemadeg Barat hanya 75 orang atau kurang lagi 45 guru PNS. Selain itu, guru Agama Hindu hanya ada 27 orang, dan 7 orang guru olahraga.

Diakui, kekurangan guru PNS buat sementara terbantu oleh guru kontrak dan guru abdi. Jumlah guru kontrak sebanyak 19 orang, dan guru abdi sebanyak 31 orang. Para guru abdi ini paling maksimal dapat upah Rp 200

ribu per bulan. "Upah guru abdi tergantung komite dan kemampuan sekolah. Paling maksimal mereka dapat Rp 200 ribu per bulan. Menurut kepala sekolah, sudah tak bisa dinaikkan lagi upah tersebut," aku Sukrata.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan, Made Yasa, mengatakan, setiap tahunnya jumlah pegawai kontrak selalu meningkat. Tenaga kontrak paling banyak ada di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Sebab sekolah di Kecamatan Pupuan, Selemadeg, dan Selemadeg Barat, kekurangan guru. Sementara tidak ada pengangkatan PNS sehingga banyak diisi guru kontrak. "Setiap tahunnya banyak guru yang pensiun, tetapi pengangkatan guru tidak ada. Jadi kita gunakan tenaga kontrak," terang Yasa, Selasa (1/9). Tenaga kontrak memiliki masa kontrak selama satu tahun yang setiap tahunnya diperpanjang dengan gaji sebesar Rp 1,1 juta per bulan. **k21**



Dugaan Pemalsuan Sertifikat Senilai Rp 273 Miliar

Pemeriksaan Labfor, Satu Sertifikat Dinyatakan Palsu

DENPASAR, NusaBali

Polda Bali kembali merilis perkembangan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Pecatu, Kuta Selatan, Badung senilai Rp 273 miliar. Penyidik memastikan sertifikat yang disita dari PT Maspion Surabaya dinyatakan palsu. Rencananya, penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap BPN (Badan Pertanahan Badung) terkait sertifikat palsu ini.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hery Wiyanto pada, Rabu (16/9) mengatakan Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap dua sertifikat tanah seluas 3.865 are yang disita dari Notaris Ni Nyoman Sudjarni dan satu sertifikat lainnya dalam

bentuk HGB (Hak Guna Bangunan) yang disita dari PT Maspion, Surabaya.

Hasil pemeriksaan Labfor menyatakan sertifikat yang disita dari PT Maspion Surabaya dinyatakan palsu. Ini terlihat dari beberapa tanda tangan yang discanner. "Selain itu ada beberapa kejanggalan lainnya yang ditemukan dari sertifikat yang dinyatakan palsu ini," jelas Kombes Hery.

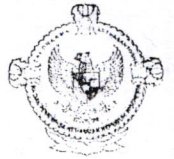
Setelah memastikan sertifikat palsu ini, penyidik berencana memanggil kembali beberapa pejabat BPN Badung yang sudah sempat diperiksa sebelumnya. Selanjutnya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun mantan Kabid Humas Polda Bengkulu ini belum mau berkomentar

terkait siapa saja yang akan diperiksa atau calon tersangka. "Itu sudah masuk teknis penyelidikan. Tidak bisa kami ungkap," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, I Gede Made Subakat melaporkan kasus pemalsuan sertifikat seluas 3.865 are di areal Pura Jurit Uluwatu Pecatu ke Bareskrim Mabes Polri pada 24 November lalu, dengan nomor laporan LP/1053/XI/2014/Bareskrim. Made Subakat melaporkan dua terlapor, yakni I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Bali sejak Desember 2014 lalu. Pelapor Made Subakat merasa dirugikan atas pemalsuan sertifikat yang dijual dua terlapor seharga Rp 273 miliar. **rez**

Edisi : Kanis, 17 September 2015

Hal : 5



• NUSABALI/HENDRA

SUASANA acara Bimtek implementasi tata kelola keuangan desa di Kota Denpasar 2015, Rabu (16/9) pagi.

Pj Walikota: Hati-hati Gunakan Anggaran Desa

DENPASAR, NusaBali

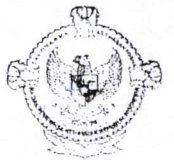
Penjabat Walikota Denpasar AA Gede Geriya mengingatkan para kepala desa dan aparatnya agar hati-hati dalam menggunakan anggaran desa. Hal ini untuk menghindarkan jangan sampai terjebak pada hukum. Hal tersebut disampaikan saat membuka bimbingan dan latihan bagi 75 peserta dari unsur Inspektorat, Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, Kepala Desa Se-Kota Denpasar, Sekretaris Kecamatan serta Kaur Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa, Rabu (16/9) di Hotel Santhi Denpasar.

AA Gede Geriya mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai tindak lanjut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Keuangan Desa harus ditujukan pada percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Langkah yang dilakukan dengan pemberdayaan potensi desa," kata Agung Geriya. Melalui bintek ini diharapkan aparat desa dapat memahami penggunaan anggaran yang akuntabel, transparan dan partisipatif dilakukan dengan tertib anggaran.

Terkait dengan penggunaan anggaran desa, Gede Geriya meminta semua pihak harus hati-hati dan jangan sampai terjebak oleh hukum. "Kami menghimbau perangkat desa untuk bekerja secara transparan, terbuka dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Bali sehingga bisa dihindari hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Made Mertajaya mengatakan, untuk pengelolaan dana desa di Kota Denpasar akan dicairkan melalui tiga kali amprahan masing-masing sekali amprah mencapai Rp 300 juta lebih. Dimana tahap pertama telah diamprah untuk 27 desa sebesar 40 persen dari anggaran desa telah dilakukan bulan Agustus sedangkan bulan September amprahan kedua dan 20 persen amprahan anggaran desa dilakukan bulan Oktober sehingga seluruh anggaran desa dapat cair. "Kami harapkan melalui pelatihan ini para kepala desa dan aparat desa dapat menggunakan anggaran desa sesuai dengan perencanaan," ujarnya.  n

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 3



PASAR Seririt yang masih menunggu proses perehaban, pasca terbakar setahun yang lalu.

Masuk Lelang DED, Renovasi Pasar Seririt Ditarget 2016

SINGARAJA, NusaBali

Setahun lebih pasca mengalami kebakaran hebat, Pasar Seririt, yang merupakan salah satu pasar besar di Buleleng, sudah memasuki masa lelang Detail Engineering Design (DED). Meski sempat mengalami penundaan proses renovasi beberapa lama, dipastikan realisasi perbaikan pasar Seririt akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang.

"Sampai saat ini, proses lelang DEDnya sudah berlangsung. Setelah ini nanti baru menyusun usulan baik itu ke Pemprov atau pemerintah pusat. Yang jelas untuk rehab fisiknya akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang," ujar Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Buleleng Ir Ni Made Arnika, Rabu (16/9) kemarin.

Menurutnya, usulan rehab Pasar Seririt, melan alokasi anggaran sebesar Rp 18 miliar. Sejumlah anggaran tersebut, akan digunakan untuk merehab ribuan kios yang ada di dalam pasar, yang hangus terbakar pada Juli 2014 lalu. "Karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, usulannya nanti apakah bias menggunakan APBN atau APBD I," imbuh dia.

Sebelum dinyatakan untuk direhab, Pasar Seririt juga telah menjalani hamer tes, untuk menilai dasar bangunan apakah masih layak digunakan atau tidak. Dari hasil tes pengujian, dasar bangunan dinyatakan masih layak untuk digunakan, sehingga hanya perlu proses rehab.

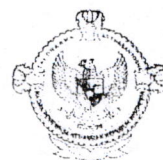
Selain program perehaban pasar Seririt, Pemkab Buleleng juga tengah merencanakan penataan dua pasar besar lainnya, yakni Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar Buleleng. Namun sampai saat ini, rencana penataan yang awalnya diperbincangkan di tahun ini, belum menemui titik terang.

Disebut-sebut, minimnya APBD yang dimiliki oleh Pemkab Buleleng, sehingga proses penataan masih menunggu, dan mengutamakan hal yang lebih prioritas. Sementara itu, tahun ini juga dilakukan revitalisasi empat pasar desa yang ada di Buleleng. Diantaranya pasar Desa bengkel, Munduk, Gerokgak dan Banjar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah tersebut dinyatakan bertambah dari tahun lalu yang hanya berjumlah tiga pasar.

Data terakhir Diskopdagrin Buleleng, masih ada 20 pasar desa yang masih masuk daftar tunggu, untuk mendapatkan giliran revitalisasi pasar desa. "Masih ada 20 pasar desa yang masuk daftar tunggu, tahun berikutnya akan diseleksi sesuai prioritasnya," kata dia. k23

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 4



• NUSABALI/YUDA

TERDAKWA, Ketut Wirten saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan agenda keterangan saksi, Selasa (15/9).

Sidang Dugaan Korupsi Prona Buleleng Saksi Mahkota 'Gigit' Camat dan BPN

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Sumberkima, Grokgak, Buleleng dengan terdakwa Sekdes Sumberkima, Ketut Wirten menghadirkan lima saksi termasuk saksi mahkota I Gede Kardin, Yudiasa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama. Dalam sidang, Kardin yang berperan sebagai koordinator kecamatan mengaku membagikan uang kepada Camat Gerokgak hingga pejabat di BPN (Badan Pertanahan Negara) Buleleng.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (15/9) yang dipimpin majelis hakim Beslin Sihombing, saksi Kardin dihadirkan berbarengan dengan empat saksi lainnya, yaitu Camat Gerokgak, Oka Susrama dan staf camat, Putu Kusmadi serta Kasubsi Pertanahan BPN, Ariasa dan Ardana.

Seluruh saksi dari kecamatan dan BPN mengaku tidak tahu ada pungutan ke warga Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan Rp 600 ribu untuk pengurusan Prona. Malah saksi menjelaskan jika penyertifikatan tersebut gratis karena sudah dianggarkan negara melalui BPN.

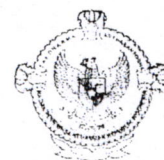
Sementara itu, Kardin mengaku seluruh uang yang dipungut dari warga untuk membuat sertifikat sebesar Rp 600 ribu dipegang oleh tim kecil Prona dengan Ketua Panitia, Wirten. Dari uang Rp 600 ribu tersebut, Kardin diserahkan Rp 300 ribu untuk dibagikan ke atas. "Saya disuruh membagikan uang terima kasih ini ke atas," jelas Kardin. Saat diminta merinci siapa saja yang menerima uang dari 267 warga pembuat pronas tersebut, Kardin dengan gamblang menjelaskannya.

Ia menyebut Camat Gerokgak, Oka Susrama menerima Rp 55 ribu dan Kasubsi BPN, Ariasa menerima Rp 50 ribu dan Ardana menerima Rp 15 ribu. "Camat terima Rp 55 ribu dikali 267 sertifikat, Ariasa menerima Rp 50 ribu dikalikan 267 sertifikat, Ardana menerima Rp 15 ribu dikalikan 267 sertifikat dan Erwin (staf BPN lainnya, red) menerima Rp 35 ribu," jelasnya secara gamblang.

Majelis hakim lalu mengkonfrontir keterangan ini kepada empat saksi lainnya yang disebut Kardin menerima aliran dana korupsi ini. Namun semuanya membantah menerima uang dari Kardin yang disebut sebagai uang terima kasih. Bahkan, Ariasa mengaku hanya sekali bertemu dengan Kardin terkait urusan Prona dan mengaku tidak pernah diberikan uang. rez

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 5



Petunjuk Pemprov Bupati Bangli Tunggu

★ Untuk Merevisi SK Honor Anggota
KPU-Panwaslu Bangli

Panwaslu Bangli mengaku belum puas, selama rencana untuk merevisi SK Bupati itu belum ada bukti kongkritnya.

BANGLI, NusaBali



Pemkab Bangli masih menunggu petunjuk Pemprov Bali terkait revisi Surat Keputusan

(SK) Bupati Bangli tentang besaran honor anggota Panwaslu dan KPU Bangli, yang sebelumnya menuai protes dan mengancam penyelenggaraan Pilkada Bangli 9 Desember nanti. Kesepakatan revisi SK itu sendiri setelah dilakukan pertemuan antara KPU RI, Bawaslu RI, KPU Bali, Bawaslu Bali dan Pemkab Bangli, Senin (14/9) lalu.

"Begitu selesai pertemuan, kami sudah kembali bersurat ke Pemprov Bali, salah satunya adalah untuk mohon petunjuk apa yang harus dilakukan. Sejatinya saya dari dulu ingin mengubah SK itu, namun untuk mengubahnya belum ada dasar yang kuat sebagai pendukung," ujar Penjabat Bupati Bangli,

Dewa Gede Mahendra Putra saat dikonfirmasi, Rabu (16/9).

Menurutnya, pihaknya saat ini tengah menunggu surat pengesahan pencabutan SK tersebut dari provinsi. Sementara Ketua Panwaslu Bangli, I Nengah Sandiarta, saat dikonfirmasi mengenai revisi SK tersebut, mengaku belum puas, selama hal itu belum ada bukti kongkritnya. "Kami belum merasa puas karena hal itu belum pasti. Belum ada dokumen tertulis sebagai bukti dan dasar dari kami di Panwaslu," ujar Sandiarta saat ditemui, Rabu (16/9).

Sebelumnya diberitakan Ketua KPU Bangli, Dewa Agung Lidartawan mengatakan kisruh honor penyelenggara Pilkada



Dewa Gede Mahendra Putra

Bali ini ke polisi, sehingga kasusnya terungkap dan 6 korban bersama sang Mami berhasil diamankan jajaran Polres Tabanan, Selasa (15/9) siang.

Trio Siti Aisyah (korban), Siti Masitoh (sang Mami), dan Wayan Widana (pemilik kafe) dibawa jajaran Polres Sukabumi ke Jawa Barat, Rabu pagi sekitar pukul 10.30 Wita. Kecuali Siti Aisyah, 5 perempuan waitress kafe lainnya asal Jawa barat yang sama-sama diduga korban human trafficking, masih diamankan di Mapolres Tabanan, Rabu kemarin. Mereka tetap menjalani pemeriksaan intensif di Ruang Konseling Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 16